

# LAPORAN

## PERIODIK PERBULAN TERHADAP VOLUME SAMPAH HARIAN



### KABUPATEN KAUR TAHUN 2007



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
SEKRETARIS DAERAH**

Jl. Merdeka Barat No. 8 Bintuhan – Kaur Tlp. 0739 61481

**NOVEMBER 2007**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
SEKRETARIS DAERAH**

Jl. Merdeka Barat No. 8 Bintuhan – Kaur Tlp. 0739 61481

---

**LAPORAN**

**PERIODIK PERBULAN TERHADAP VOLUME  
SAMPAH HARIAN**

**KABUPATEN KAUR  
TAHUN 2007**

**NOVEMBER 2007**

## KATA PENGANTAR

Sampah kota diartikan sebagai bahan organik dan atau bahan anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi di kota tersebut. Sumber sampah umumnya berasal dari perumahan dan pasar. Permasalahan sampah merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus, bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan.

Di Kabupaten Kaur, khususnya di Ibu Kota Kabupaten, Kota Bintuhan, permasalahan sampah belum menjadi permasalahan yang krusial, hal ini dikarenakan jumlah penduduknya relatif masih sedikit. Jumlah penduduk Kabupaten Kaur pada tahun 2006 adalah sekitar 107.473 jiwa; sedangkan yang bermukim di Bintuhan (Kecamatan Kaur Selatan) sekitar 15.898 jiwa dengan kepadatannya 161 jiwa per km<sup>2</sup>. Namun demikian sejalan dengan pembangunan daerah, dan peningkatan jumlah penduduk, kedepan masalah persampahan akan menjadi masalah yang besar juga di Kaur. Untuk menanggulangi masalah persampahan, Pemerintah Kabupaten Kaur sudah menyediakan 2 mobil angkutan sampah dan menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA).

Untuk mengetahui volume sampah periodik perbulan dilakukan pengamatan terhadap volume sampah harian, dengan pengamatan di lokasi TPA dan timbunan sampah yang ada di pasar. Hal ini sesuai dengan Lampiran IV Peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2006. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk pengembangan pembangunan persampahan di Kabupaten Kaur.

Kaur, November 2007

Asisten Pemerintahan  
Kabupaten Kaur

M. Yusuf Nurdi, SH  
NIP. 450 005 231

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Umum .....	1
2. Kondisi Limbah Padat Domestik.....	1
BAB II. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN .....	3
1. Timbunan Sampah.....	4
2. Sampah terangkut .....	5
3. Sistem Pengolahan Sampah.....	6
4. Kegiatan 3 R (Reuse, Reduse dan Recycling).....	7
5. Upaya mengatasi sampah kota.....	12
BAB III. PENUTUP .....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Kondisi Umum Kabupaten Kaur .....	1
Tabel 2. Limbah Domestik dan Pemanfaatannya Kembali .....	8

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi TPA Linau di Kabupaten Kaur .....	2
Gambar 2. Timbunan Sampah di Pembuangan Sementara Bintuhan .....	4
Gambar 3. Komposting sampah dan hasil pengomposan sampah .....	9

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1. Umum

Data statistik tahun 2006, menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Kaur adalah sebanyak 107.473 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan. Kecamatan Kaur Selatan, sebagai ibu kota Kabupaten, jumlah penduduknya adalah 15.898 jiwa dengan kepadatannya 161 jiwa per km<sup>2</sup>. Kota Bintuhan merupakan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan dan sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Kaur.

Tabel 1. Kondisi Umum Kabupaten Kaur

No.	Uraian	Isian
1.	Nama Kabupaten	Kaur
2.	Propinsi	Bengkulu
3.	Jumlah Penduduk Kota	
	a. Adimistrasi (Kecamatan Kaur Selatan)	15.898 jiwa
	b. Di wilayah dengan kepadatan penduduk > 5000 jiwa/km <sup>2</sup>	Tidak ada
	c. Tingkat Pertumbuhan Penduduk	2,36 %
4.	Luas Wilayah Kota (Kecamatan Kaur Selatan)	
	a. Luas administratif	98,636 km <sup>2</sup>
	b. Luas wilayah yang mendapat pelayanan kebersihan	10 km <sup>2</sup>

*Sumber : Kaur dalam Angka, 2007*

### 2. Kondisi Limbah Padat Domestik

Pola konsumsi masyarakat Kota Bintuhan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat wilayah pedesaan, hal ini diindikasikan oleh besarnya pengeluaran per kapita penduduk per bulan. Pola konsumsi masyarakat perkotaan ini akan menghasilkan banyak sampah. Jika sampah di Kota Bintuhan tidak dikelola dengan baik diprediksikan akan menimbulkan permasalahan, baik permasalahan lingkungan maupun permasalahan social dan budaya.

Sampah adalah bahan terbuang atau dibuang yang berasal aktivitas manusia maupun alam yang dinilai tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah Kota Bintuhan berasal dari rumah tangga, pasar, perkantoran, puskesmas, pertanian, hotel, rumah makan, dan lain-lain. Jumlah sampah domestik di Kota Bintuhan dan wilayah lainnya di Kabupaten Kaur cenderung meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kaur, pada tahun 2007 rata-rata produksi sampah masyarakat adalah sekitar 20 m<sup>3</sup>/hari atau 10 ton/hari. Pengelolaan sampah di Kota Bintuhan hanya dilakukan dengan sistem *open dumping*, dimana timbulan sampah harian yang terkumpul di kota diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa pengelolaan 3 R (*reduce, reuse, dan recycle*) pada sumbernya.

Jumlah sampah di Kabupaten Kaur relatif sedikit jika dibandingkan dengan sampah kota yang terdapat di kota-kota besar, seperti Bandung dan Surabaya. Sebagai perbandingan jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Bandung sebesar 1.300 ton per hari sedangkan di Kota Surabaya 1.500 ton per hari. Untuk TPA di Kabupaten Kaur jumlah sampah yang masuk sekitar 10 ton per hari, yang berasal dari sampah rumah tangga dan sampah pasar dari Kota Bintuhan, dengan jumlah armada mobil sekitar 2 mobil truk per hari.



Gambar 1. Lokasi TPA Linau di Kabupaten Kaur

## BAB II. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Saat ini, pada umumnya sampah kota di buang ke TPA dan banyak juga dibuang ke lingkungan sekitar rumah dan kemudian dibakar. Sedangkan sampah di wilayah pedesaan umumnya dibuang ke lingkungan. Lokasi TPA di Kabupaten Kaur terletak di Desa Linau, dengan luas sekitar 1 hektar, dan terletak pada ketinggian 32 m dpl. Pada TPA tersebut tidak dilengkapi fasilitas yang standar untuk sebuah TPA. Jumlah sampah yang di buang di TPA ini setiap harinya 2 truk pengangkut sampah (10 ton) dengan menggunakan truk kebersihan. Sampah dibuang di arah tebing dan merupakan genangan air seperti rawa. Sampah di TPA ini tidak ada aktivitas merubahnya jadi kompos. Pada saat peninjauan lapangan fasilitas yang tersedia pada TPA di Kabupaten Kaur tidak ada dan fasilitas pendukung yang ada hanyalah jalan yang menuju lokasi TPA, kondisi jalannyapun sangat memprihatinkan.

Kondisi TPA sampah cukup memprihatinkan dengan fisik TPA yang kurang baik terkait dengan bangunan kantor, batas TPA, drainase, pengelolaan lindi, penanganan gas, pengaturan lahan atau zonasi, fasilitas sumur pantau, penutupan lahan, serta pencatatan volume sampah yang masuk. TPA Linau ini disekelilingnya masih berupa semak belukar yang membentuk hutan skunder. Di lokasi tersebut terdapat genangan air dan saluran air alami menyerupai waduk kecil. Melihat lokasi tersebut semestinya tidak sesuai untuk digunakan sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Jarak dari TPA ke pantai sekitar 400 meter. Bila tidak ada kebijakan yang bersifat menyeluruh dan konsisten dalam pengelolaan sampah kota oleh pihak pemerintah kabupaten, kecenderungan kondisi fisik TPA ini akan menurun dari tahun ke tahun. Areal TPA tersebut baru berupa penunjukan, belum ada aktifitas pembuatan bangunan TPA, yang ada hanyalah proses pembuangan sampah dengan sistem *open dumping* sebanyak 1 -2 truk per hari.

## 1. Timbulan Sampah

Sampah adalah bahan terbuang atau dibuang yang berasal aktivitas manusia maupun alam yang dinilai tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah Kota Bintuhan berasal dari rumah tangga, pasar, perkantoran, puskesmas, hotel, pertanian, rumah makan, dan lain-lain. Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kaur, pada tahun 2007 rata-rata timbulan sampah Kota Bintuhan 20 m<sup>3</sup>/hari atau 10 ton per hari. Jumlah sampah domestik di Kota Bintuhan cenderung meningkat setiap tahun, karena beberapa hal berikut ini :

1. Pola konsumsi masyarakat yang belum berwawasan lingkungan, seperti penggunaan kemasan (berupa kertas, kantong plastic, kaleng dan lainnya) yang bersifat *non-biodegradable* masih tinggi.
2. Peningkatan jumlah timbulan sampah tidak didukung oleh pengadaan sarana dan prasarana teknis.
3. Belum ada pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir.
4. Belum ada kebijakan yang bersifat menyeluruh dan konsisten dalam pengelolaan sampah kota dan desa
5. Petunjuk teknis dalam pengelolaan sampah kota masih belum dapat diimplementasikan.
6. Terbatasnya anggaran pengelolaan sampah serta tidak adanya investasi dalam mendukung pengelolaan sampah kota.



Gambar 2. Timbunan Sampah di Pembuangan Sementara Bintuhan

## 2. Sampah Terangkut

Pengelolaan sampah di Kota Bintuhan hanya dilakukan dengan sistem *open dumping*, dimana timbulan sampah harian yang terkumpul di kota diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa pengelolaan 3 R (*reduce, reuse, recycle*) pada sumbernya. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kaur tahun 2007, timbulan sampah Kota Bintuhan lebih kurang 20 m<sup>3</sup>/hari. Timbulan sampah ini setiap hari diangkut ke TPA, jumlah sampah yang terangkut setiap hari hanya lebih kurang 15 – 20 m<sup>3</sup>/hari (75 – 100%). Jika yang terangkut hanya 75 %, maka pada hari itu akan tertumpuk sisa sampah sekitar 5 m<sup>3</sup>, dan biasanya akan terangkut hari berikutnya.

Kadang tidak dapat terangkutnya seluruh timbulan sampah kota ini ke TPA karena beberapa hal berikut :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dan sektor swasta membuang sampah ke dalam kontainer dan tempat sampah yang telah tersedia
2. Sedikitnya tenaga operasional lapangan, seperti kurangnya pegawai dan tenaga kerja pengangkut/pengumpul sampah
3. Sedikitnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kaur. Pada tahun 2007, sarana dan prasarana yang tersedia terdiri dari : 2 unit Dum Truck dan bak angkut truknya

Bila kondisi ini tidak diatasi, akan semakin terjadi tumpukan-tumpukan sampah di wilayah kota. Semenjak terbentuk kabupaten baru (2004), urbanisasi ke Kota Bintuhan cukup tinggi, ini akan berdampak pada penambahan jumlah sampah di kota. Tumpukan sampah yang tidak terangkut ini berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat. Hal ini diindikasikan antara lain oleh : timbul bau yang tidak sedap, tercemarnya air tanah oleh air lindih, berkembang biaknya lalat dan nyamuk. Kondisi ini berakibat pada kesehatan masyarakat karena berjangkitnya berbagai penyakit seperti : diare, malaria, sesak napas, kulit gatal-gatal, dan lain-lain.

### 3. Sistem Pengolahan Sampah Kota

Kota Bintuhan memiliki TPA *open dumping* seluas 1 ha yang berlokasi di desa Linau Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. TPA ini kondisinya dikategorikan kurang bagus karena kondisi sampah pada zona aktif jelek. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, TPA ini tidak memiliki prasarana dasar dan sarana penunjang seperti kantor/pos jaga, pagar, alat berat; sarana pencegahan dan pengendalian pencemaran seperti drainase, pengolahan lindi, sumur pantau dan penanganan gas; dan cara operasi yang meliputi pengaturan lahan, penimbunan dan penutupan. Lokasi TPA terletak di kawasan semak belukar menuju ke ladang penduduk dengan system pembuangan sampah adalah terbuka (*open dumping*). Lokasinya terletak sekitar 400 meter dari pantai dan terdapat genangan serta saluran air alami di lokasinya. Bila jumlah volume sampah perharinya mencapai 5000 m<sup>3</sup>/hari dibutuhkan lahan 10 ha untuk satu tahun. Namun kondisi ini belum terjadi di Kabupaten Kaur, tapi untuk kurun waktu tertentu kedepan sejalan dengan bertambah pesatnya pembangunan di Kabupaten Kaur kondisi ini bias terjadi. Masalah Persampahan di Kabupaten Kaur adalah : kelembagaan dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana pendukung persampahan.

Sampah yang di buang ke TPA tidak dilakukan pengolahan, hanya ditumpuk begitu saja tanpa dilakukan pengaturan lahan, penimbunan dan penutupan. Kondisi ini terjadi karena beberapa hal berikut ini :

1. Tidak memiliki prasarana dasar sarana penunjang sistem pengolahan sampah kota.
2. Terbatasnya sumberdaya manusia (tenaga ahli, tenaga teknis) dibidang sistem pengelolaan sampah kota
3. Terbatasnya anggaran pengelolaan sampah yang disebabkan oleh kurangnya kepedulian pemerintah daerah akan pengelolaan sampah
4. Belum ada kebijakan yang bersifat menyeluruh dan konsisten dalam pengelolaan sampah kota

#### 4. Kegiatan 3 R (Reuse, Reduce & Recycle)

Kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan sampah adalah pengelolaan sampah dilaksanakan dengan paradigma baru, yaitu :

1. pengurangan/pembatasan sampah. Pemerintah daerah mendorong dan menciptakan proses dan hasil produksi apapun yang ramah lingkungan terutama mengurangi produksi sampah, menggunakan kembali produk atau kemasan, mendaur ulang sampah.
2. *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R). Sampah harus dikelola dengan menerapkan prinsip 3R sehingga hanya sampah yang belum/tidak dapat didaur ulang yang boleh dibuang (dengan perlakuan tertentu). Seluruh sumber daya Pemda yang selama ini digunakan untuk kegiatan kumpul-angkut buang sampah dialihkan ke kegiatan pengelolaan sampah (pengurangan potensi sampah dari produsen, 3R dan pengelolaan TPA berwawasan lingkungan).
3. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (kabupaten/kota), dilaksanakan dengan melibatkan peranan swasta dan partisipasi masyarakat.

Pada saat ini, pemerintah Kabupaten Kaur hanya melakukan kegiatan kumpul-angkut-buang sampah ke TPA dengan sistem *open dumping*. Sampah yang tertumpuk di TPA dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan perlakuan dan pengolahan. Memperhatikan sistem pengelolaan sampah seperti ini, hendaknya pemerintah kabupaten mencoba untuk melaksanakan pengelolaan sampah dengan 3R.

Pada sistem pengelolaan 3 R ini, sampah anorganik yang sulit didegradasi oleh mikroorganisme dipisahkan dari sampah organik dan dikumpulkan sesuai dengan sifat dan jenisnya. Misalnya semua jenis logam (besi, aluminium, seng, tembaga dll) dikumpulkan menjadi satu, dipisahkan dari sampah gelas dan plastik, untuk memudahkan proses daur ulang sampah. Cara 3 R ini akan sangat membantu proses daur

ulang sampah sehingga menjadi bahan yang masih dapat dimanfaatkan lagi bagi kehidupan manusia.

Kegiatan 3R yang dapat dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten antara lain : teknologi pengomposan, teknologi pembuatan Kertas daur ulang, teknologi pembuatan plastik, teknologi logam, teknologi pembuatan gelas, dan teknologi pembakaran. Beberapa cara 3R dalam pemanfaatan kembali limbah domestik disajikan pada berikut ini :

Tabel 2. Limbah Domestik dan Pemanfaatannya Kembali

No.	Jenis Limbah Domestik	Pemanfaatannya Kembali (Daur Ulang)
1.	Kertas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibuat bubur pulp lagi untuk bahan kertas, cardboard, dan produk-produk kertas lainnya</li> <li>2. Dihancurkan untuk dipakai sebagai bahan pengisi, bahan isolasi</li> <li>3. Diinsenerasi sebagai penghasil panas</li> </ol>
2.	Bahan Organik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibuat kompos untuk pupuk tanaman</li> <li>2. Diinsenerasi sebagai penghasil panas</li> </ol>
3.	Tekstil/Pakaian (bekas)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dihancurkan untuk dipakai sebagai bahan pengisi, bahan isolasi</li> <li>2. Diinsenerasi sebagai penghasil panas</li> <li>3. Disumbangkan kepada yang memerlukan</li> </ol>
4.	Gelas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibersihkan dan dipakai lagi (botol)</li> <li>2. Dihancurkan untuk digunakan lagi sebagai bahan pembuat gelas baru</li> <li>3. Dihancurkan dan dicampur aspal untuk pengerasan jalan</li> <li>4. Dihancurkan dan dicampur pasir dan batu untuk pembuatan bata semen</li> </ol>
5.	Logam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dicor untuk pembuatan logam baru yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan</li> <li>2. langsung digunakan lagi bila keadaanya masih baik dan memungkinkan</li> </ol>
6.	Karet, kulit dan plastik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dihancurkan untuk dipakai sebagai bahan pengisi, isolasi</li> <li>2. Diinsenerasi sebagai penghasil panas</li> <li>3. Dibersihkan dan dipakai lagi</li> </ol>

Sumber : Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, 2004

Kegiatan 3R yang memungkinkan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur pada saat ini adalah metode komposting. Keuntungan metode ini antara lain : mengurangi buangan sampah kota ke TPA, emisi gas metana, dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitar seperti bau busuk dan pencemaran air tanah.



Gambar 3. Komposting sampah dan hasil pengomposan sampah

Metode ini masih berpeluang besar untuk program pemanfaatan timbulan sampah domestik Kota Bintuhan. Memperhatikan timbunan sampah Kota Bintuhan masih relatif kecil, metode komposting cukup berarti dalam mereduksi timbulan sampah. Pemanfaatan sampah dengan metode komposting selain mampu mengurangi volume buangan sampah ke TPA juga memberikan keuntungan ekonomis. Produksi kompos dari sampah padat organik ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik bagi budidaya tanaman di wilayah Kabupaten Kaur. Mengingat bahwa wilayah Kabupaten Kaur merupakan salah satu daerah pertanian, sangat penting bagi Pemda Kabupaten Kaur untuk merintis pengelolaan sampah dengan metode komposting berbasis masyarakat. Kompos yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik secara subsisten dan komersial untuk budidaya tanaman.

Metode komposting yang sederhana dan efektif untuk menghasilkan kompos yang berkualitas baik antara lain adalah dengan proses pembuatan pupuk vermikompos. Vermikompos merupakan kompos yang proses pembentukannya dilakukan oleh cacing. Kompos ini adalah hasil degradasi bahan organik oleh bakteri mesofilik, cendawan dan cacing. Pembuatan vermikompos cukup sederhana dan dapat diusahakan dalam skala rumah tangga maupun skala komersial. Komponen yang penting dalam membuat vermikompos secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. Cacing. Banyaknya cacing yang dibutuhkan sekitar 1 – 2 kg per meter persegi wadah.
2. Tempat. Tempat yang akan digunakan untuk budidaya perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan : terlindung dari sinar matahari langsung, hujan dan hama; mudah dikelola oleh peternak dan cukup bersih; serta mempunyai sirkulasi udara yang baik, seperti ember, drum, kaleng, bangunan semi permanent, dll.
3. Media. Persyaratan sebagai media meliputi : memenuhi kebutuhan pangan bagi cacing, menciptakan lingkungan yang tidak fluktuatif dan tidak mudah memadat, mengandung protein, telah melewati fase termofilik, memungkinkan adanya drainase yang baik, mempunyai daya memegang air yang cukup, bebas tanah dan tidak mengandung senyawa-senyawa kuat seperti ammonia dan minyak atsiri. Pilihan yang dapat dipakai misalnya kotoran ternak, rumput, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Media organik yang akan digunakan, misalnya kotoran sapi, dicampur dengan potongan jerami padi atau rumput kering. Fungsi jerami adalah untuk menciptakan aerasi yang baik. Jerami diratakan pada dasar wadah. Ketebalan jerami sangat tergantung dengan ukuran wadah yang digunakan. Untuk wadah dengan tinggi 30 – 40 cm dapat dialasi jerami dengan ketinggian sekitar 10 cm. Di alas ini kemudian kita taburkan media, baru kemudian cacing dimasukkan.

4. Lingkungan Cacing tanah sangat peka terhadap suhu dan kelembaban. Suhu optimum diperlukan 15 – 25 °C . Jika pada media terjadi kondisi suhu yang tidak merata dan hal ini akan mengganggu pemanenan. Kelembaban antara 60 – 90% adalah kisaran yang dapat ditolerir oleh cacing. Perlu diingat bahwa telur cacing mudah terdehidrasi yang dicirikan dengan mengkerutnya permukaan telur. Keasaman media yang dapat ditolerir oleh cacing cukup lebar rentangnya yaitu antara pH 5 hingga pH 9.
5. Perawatan. Kegiatan perawatan meliputi penambahan pakan, pengadukan, pengontrolan suhu dan pH media. Pemberian pakan dapat dilakukan dengan menaburkan secara merata dipermukaan media atau menambah pada sebagian tempat. Penambahan air diperlukan bila kelembaban air berkurang.
6. Pemanenan. Pemanenan dilakukan bila pakan yang kita berikan telah berubah menjadi serbuk halus. Cara pemanenan yang sederhana dilakukan dengan memilahkan media dari cacing. Bila media cukup basah, hasil pemanenan dikering anginkan terlebih dahulu kemudian diayak.

Meskipun nampaknya sederhana akan tetapi persyaratan-persyaratan diatas jangan diabaikan bila ingin mendapatkan hasil yang baik. Perlu diingat bahwa kualitas produk termasuk kandungan hara akan sangat bergantung pada bahan baku yang digunakan sebagai media. Akhirnya sebagai bagian dari suatu ekosistem maka keberadaan cacing tanah dapat terganggu oleh predator seperti semut merah, lipan, lipas, katak dan unggas.

Di Kabupaten Kaur, **belum ada Kegiatan 3 R (Reuse, Reduce & Recycle)** yang dilakukan. Ke depan harapannya pemerintah kabupaten bisa mensosialisasikan tentang kegiatan 3R dalam rangka pengelolaan sampah, sehingga Kabupaten Kaur yang indah, bersih, dan berdayaguna bisa tercapai.

## **5. Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah Kota**

Melalui SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 99 Tahun 2006 Program Bangun Praja diubah kembali menjadi Program Adipura agar mudah dipahami oleh masyarakat. Program Adipura diadakan untuk mengevaluasi pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan fasilitas publik di kawasan perkotaan. Program Adipura ini menuntut pemda dan masyarakat mewujudkan kota bersih dan teduh. Untuk mendukung Program Adipura Kota Bintuhan, pemda Kabupaten Kaur dapat mewujudkan kota bersih dengan melaksanakan kegiatan :

1. Lomba kreasi program daur ulang sampah bagi kelompok lingkungan tempat tinggal (RT/RW) untuk menemukan pionir lingkungan. Dengan kegiatan ini, penduduk akan terbiasa memilah sampah menjadi sampah organik, plastic, kertas dan logam. Sampah organik dari dapur dibuat kompos di setiap rumah. Sedangkan, sampah plastik, kertas dan logam dikumpulkan dalam kontainer di tempat pembuangan sampah. Dengan kegiatan ini akan diperoleh insentif ekonomi yang menjadi daya tarik. Insentif tersebut antara lain : penjualan kompos, jual-beli sampah anorganik, pembuatan tong sampah.
2. Lomba program lingkungan bagi lembaga pendidikan dan institusi pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan minat guru, murid dan pegawai dalam pembelajaran pengelolaan sampah di lingkungannya. Program ini merupakan kegiatan terpadu penanggulangan sampah di sekolah SD, SMP, SMA, dan instansi pemerintah. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemilihan sampah, piket sampah, pembuatan kompos, pembibitan, penjualan tanaman hias hingga pembimbingan kepada masyarakat sekitar.

### BAB III. PENUTUP

Volume sampah harian di Kota Bintuhan, sebagai pusat kota Kabupaten Kaur, adalah sekitar 20 m<sup>3</sup> atau 10 ton per hari. Sampah tersebut di angkut ke TPA Desa Linau dengan menggunakan truk angkutan sampah. Kondisi TPA nya belum sesuai standar, dengan teknik pembuangan sistem *open dumping*. Melihat kecenderungan semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah Kota Bintuhan dan program mewujudkan kota bersih dan teduh, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu melakukan upaya perbaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif antara institusi pemerintahan Kabupaten Kaur terkait program kota bersih dan teduh.
2. Melakukan reformasi kebijakan tentang pengelolaan sampah untuk mendorong perubahan cara pandang masyarakat dari menganggap sampah sebagai limbah atau bahan yang tidak berguna lagi menjadi sampah sebagai sumber daya, dan selanjutnya dengan kebijakan tersebut disusun raperda pengelolaan sampah sebagai acuan pengelolaan sampah di Kabupaten Kaur.
3. Membuat tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang sesuai dengan standar dan ketentuan.
4. Menetapkan Raperda menjadi perda tentang pengelolaan sampah.
5. Mensinergiskan kepedulian lingkungan dalam peningkatan kembali peran program-program kerja bakti, Posyandu, PKK, dan mengembangkan kearifan tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan lingkungan yang berkembang di masyarakat untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat dan melestarikan fungsi lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deputy Minister For Pollution Control, 2005. *Domestic Solid Waste Management In Indonesia*. Joint Waorking Group In The Environmental Indonesia – Australia.
- Dipo Yuwono. 2005. *Kompos*. Penebar Swadaya. Depok. 91 p.
- Hidayat. 2001. *Proses Pembuatan Pupuk Vermikompos*. Warta Unib. No.XVII. P : 5.
- Kementrerian Lingkungan Hidup. 2006. *Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2006*. Jakarta.
- Murbandono, 2005. *Membuat Kompos*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2006. *Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2007*. Jakarta.
- Yuwono, D. 2005. *Kompos dengan cara aerob maupun anaerob, untuk menghasilkan kompos yang berkualitas*. Penebar swadaya. Jakarta.